

**LAPORAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN 1
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2019**



**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Alamat Jalan Pangeran Antasari No. 01 Telp./Fax (0517) 22852 Kandangan**



BAB I

PENDAHULUAN

A. Umum

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, maka pembagian urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mencakup :

1. Sub Urusan Pengembangan Iklim Penanaman Modal yakni :
 - a) Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota
 - b) Pembuatan peta potensi investasi kabupaten/kota.
2. Sub Urusan Promosi Penanaman Modal yakni Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
3. Sub Urusan Pelayanan Penanaman Modal yakni Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu 1 (satu) pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
4. Sub Urusan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yakni Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
5. Sub Urusan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal yakni Pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintergrasi pada tingkat Daerah kabupaten/kota.



Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi :



Penetapan rencana strategis, program dan rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;



Perumusan Kebijakan pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal serta pelayanan administrasi dibidang perizinan secara terpadu



Pelaksanaan kebijakan pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, data dan system informasi penanaman modal



Koordinasi dan penyelenggaraan pelayanan administrasi dibidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian



Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelayanan administrasi dibidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian



Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kebijakan pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, data dan system informasi penanaman modal



B. Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 75 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (DPMPTSP) adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah bidang Penanaman Modal dan bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, data dan sistem informasi penanaman modal, melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai bidang tugas.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan mempunyai fungsi :

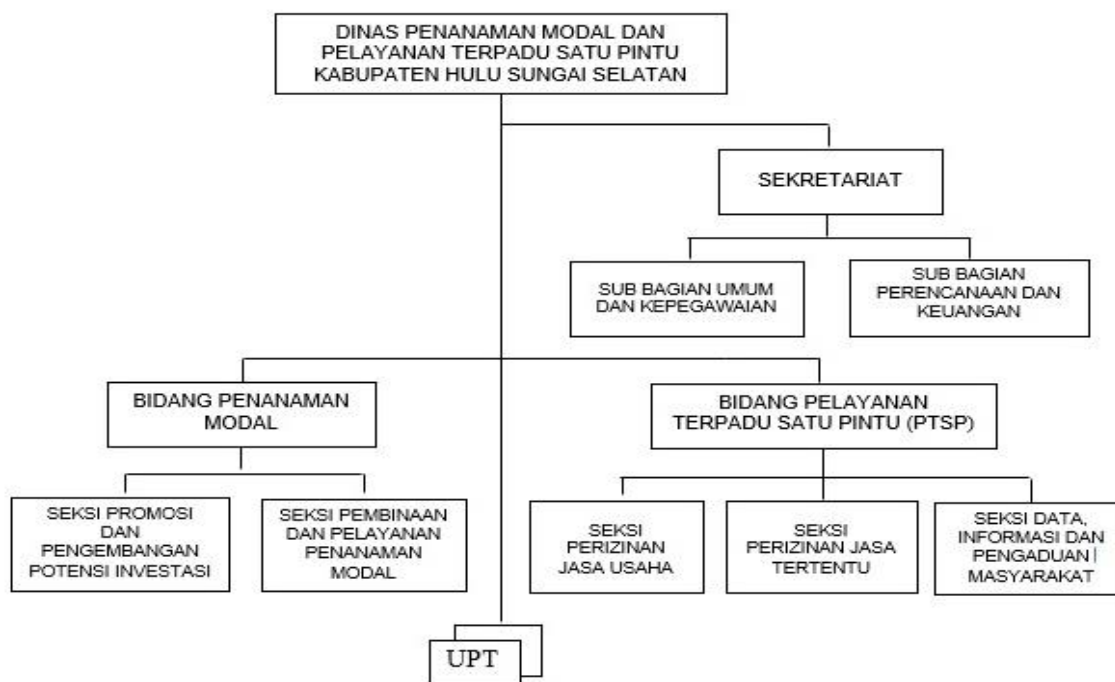
- a. penetapan rencana strategis, program dan rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. perumusan kebijakan pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, data dan sistem informasi penanaman modal serta pelayanan administrasi dibidang perizinan secara terpadu;
- c. pelaksanaan kebijakan pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, data dan sistem informasi penanaman modal;
- d. koordinasi dan penyelenggaraan pelayanan administrasi dibidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian;
- e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelayanan administrasi



- dibidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian;
- f pembinaan, pengawasan dan pengendalian kebijakan pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, data dan sistem informasi penanaman modal;
 - g evaluasi dan pelaporan kebijakan pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, data dan sistem informasi penanaman modal;
 - h evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pelayanan administrasi dibidang perizinan secara terpadu;
 - i pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - j pelaksanaan administrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
 - k pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Secara lengkap bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dilihat dalam Gambar 2.1.



Gambar 2. 1 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 menyebutkan bahwa perumusan permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis merupakan dasar untuk merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dimasa datang.

Oleh karenanya perlu dilakukan perumusan permasalahan dan analisis isu strategis terhadap tujuan dan sasaran pembangunan di Daerah. Hal ini untuk menjamin konsistensi serta sinergitas pembangunan antar wilayah dan antara pusat dan daerah, yang melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) kabupaten, provinsi, dan nasional dalam proses perumusannya.

C. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tentunya tidak terlepas dari kendala atau masalah yang dihadapi untuk tercapainya tujuan organisasi. Untuk mengidentifikasi persalahan baik dari internal maupun eksternal organisasi dapat dilakukan dengan membandingkan antara kondisi organisasi sekarang



dengan kondisi yang diinginkan. Adapun permasalahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan data dan informasi capaian pembangunan 5 (lima) tahun antara lain:

1. Peningkatan Investasi lebih banyak dipenuhi oleh sektor PMDN
Peningkatan Investasi lebih banyak dipenuhi oleh sektor PMDN, namun nilai investasi tersebut belum cukup besar sehingga masih diperlukan peningkatan penyediaan sarana dan prasarana bagi tumbuhnya investasi hingga mencapai pertumbuhan ekonomi yang diinginkan.
2. Masih kurangnya kesadaran perusahaan baik PMA maupun PMDN untuk menyampaikan data Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)
3. Masih terdapatnya izin prinsip yang telah dikeluarkan tidak terealisasi sehingga untuk mencapai realisasi investasi belum maksimal, serta masih kurang optimalnya promosi daerah sehingga masih perlu peningkatan kapasitas sumber daya manusia terutama dalam pemrosesan izin melalui OSS dan yang terakhir belum lengkapnya standar penyusunan kajian potensi investasi yang siap ditawarkan kepada calon investor.

Berdasarkan data Direktorat Pengembangan Potensi Daerah, dari 190 kasus investasi yang ditangani pokja 4 penyelesaian kasus di Kemenko Perekonomian ada tiga permasalahan utama realisasi investasi, yakni 32,6 persen permasalahan perizinan, 17,3 persen permasalahan lahan sementara 15,2 persennya ada dipermasalahan regulasi/kebijakan.

Sistem OSS merupakan salah satu elemen kebijakan percepatan pelaksanaan berusaha yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017, selain pembentukan Satgas Pengawasan Berusaha dan Reformasi Regulasi. Pelaksanaan sistem pelayanan terpadu ini diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 2018 dan bagi investasi atau kegiatan usaha yang sudah berjalan, selanjutnya dapat menyesuaikan perizinan berusaha melalui Sistem OSS, untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) ataupun perpanjangan atau perubahan izin usaha dan atau izin komersial.



Sistem berbasis Teknologi Informasi ini merupakan interkoneksi serta integrasi dari sistem pelayanan perizinan yang ada di BKPM/PTSP Pusat (SPIPISE) serta PTSP daerah yang menggunakan sistem SiCantik yang dikelola Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pemetaan peluang investasi suatu daerah juga menjadi penting dan membantu investor sehingga para investor dapat mengetahui informasi potensi suatu daerah.

Kegiatan pemetaan potensi daerah dilakukan untuk mengetahui keunggulan komparatif suatu daerah, sehingga dapat dimanfaatkan dalam merencanakan pembangunan daerah dan menentukan strategi pembangunan daerah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing tinggi.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Perencanaan Strategis Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran daripada Visi dan Misi dari Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (RPJMD 2018-2023).

Rencana Strategis (Revisi) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2018-2023. Penetapan jangka waktu tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Bupati Hulu Sungai Selatan terkait dengan penetapan/kebijakan Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan menjadi akuntabel.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah melalui tahapan-tahapan hasil rumusan bersama seluruh komponen/unit kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Selanjutnya, Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang merupakan dokumen kerja SKPD yang memuat program dan kegiatan serta target dan indikator yang hendak dicapai untuk periode 1 (satu) tahun .

Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang disusun untuk diimplementasikan dengan suatu strategi dan kebijakan yang digunakan dalam rangka pencapaian tujuan. Dengan perencanaan



strategis, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan diharapkan dapat membangun strategi sebagai bagian penting organisasi yang berorientasi pada hasil yang diinginkan di masa mendatang. Dengan penetapan visi, misi dan strategi yang jelas dan tepat, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan diharapkan akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi.

Berpedoman isu strategis RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023, khususnya Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Pelayanan Publik Berkualitas, Berbasis Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, terlihat belum sedemikian optimal. Hal ini terbukti dari koordinasi lintas kategorial serta akuntabilitas aparatur perangkat daerah yang masih perlu ditingkatkan. Mengingat besarnya afirmasi dan atensi baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Disamping itu, keberhasilan program pimpinan perangkat daerah dan pembangunan perangkat daerah pada level teknis sangat bergantung pada kinerja aparatur dan kualitas penyelenggaraan perangkat daerah tersebut. Oleh karena itu, perwujudan tata pemerintahan yang baik sangat perlu untuk ditingkatkan. Teknologi Informasi Dalam Bingkai Kehidupan Yang Agamis. Dimana berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang meliputi potensi dan permasalahan pada periode sebelumnya serta peluang dan tantangan yang dihadapi, maka dirumuskan isu-isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada 5 (lima) tahun kedepan, yaitu sebagai berikut :

1. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumber daya alam dan kearifan lokal.
Kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah di bumi Hulu Sungai Selatan baik yang tersimpan di dalam maupun dipermukaan bumi serta potensi sungai mampu menambah nilai



guna ekonomi bagi kehidupan masyarakat. Nilai guna tersebut diperoleh melalui pengembangan inovasi dan teknologi serta membuka peluang investasi bagi pihak swasta baik dalam maupun luar negeri.

2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Pelayanan Publik Berkualitas, Berbasis Teknologi Informasi Dalam Bingkai Kehidupan Yang Agamis

Tuntutan pembangunan modern memaksa perangkat daerah beradaptasi dengan teknologi informasi. Sehingga pelayanan dengan berbasis teknologi informasi menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditawar lagi. Hal ini mampu mengakomodir belum optimalnya pelayanan publik serta paradigma mainstream masyarakat yaitu urusan pelayanan di pemerintah daerah sangat birokratif dan berbelit. Sampai pada tahun 2019, penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi dan informasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih belum berjalan optimal. Sehingga masih perlu mendapatkan proporsi afirmasi lebih. Inilah sebabnya mengapa pelayanan publik berbasis teknologi informasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, khususnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu masih perlu untuk ditingkatkan.

B. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari satu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, maka dilakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan



dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Adapun penetapan target Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Adapun penetapan target Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2019 adalah sebagai berikut:



Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama Tahun 2019
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. Hulu Sungai Selatan

NO.	KINERJA UTAMA/ OUTCOMES/TUJUAN /SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/Form PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Komponen penilaian terdiri dari pengungkit 60% dan hasil 40%	Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah
2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai / Predikat AKIP	Nilai akuntabilitas kinerja menunjukkan tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil. Komponen penilaian terdiri dari perencanaan kinerja 30%, pengukuran kinerja 25%, pelaporan kinerja 15%, evaluasi kinerja 10% dan capaian kinerja 20%	Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
3	Meningkatnya pelayanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi	Kategori nilai kinerja Unit Pelayanan Publik (UPP)	Jumlah nilai aspek nilai x bobot aspek nilai	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
4	Meningkatnya Investasi PMDN	Persentase peningkatan PMDN	Jumlah nilai PMDN tahun N dikurang jumlah nilai PMDN tahun N-1 dibagi nilai PMDN tahun N-1 x 100%	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal



C. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian kinerja aparatur sipil negara (ASN) dalam suatu organisasi pemerintahan bukan hanya bersifat administratif, tetapi diharapkan dapat mengarah pada manajerial yang memiliki efek ke bawah (*top-down*) dan ke samping (*horizontal-diagonal*) dalam organisasi tersebut. Dengan begitu, penandatanganan perjanjian kinerja dapat mendorong perbaikan struktur organisasi yang kurang rapi dan meminimalisir intervensi-intervensi dari pihak yang tidak bertanggungjawab.

Menurut petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu instansi pemerintah yang termuat dalam PERMENPAN No. 53 Tahun 2014, Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan dibuatnya Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati dan Kepala SKPD untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi (*reward and punishment*);
- d. Sebagai dasar bagi Bupati untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pimpinan SKPD;
- e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.



Perjanjian Kinerja yang dilakukan antara Bupati Hulu Sungai Selatan dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:



Tabel 2.2
PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2019

2.2.1 SEKRETARIAT (URUSAN LAYANAN/PENUNJANG RUTIN)

Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Tujuan/Sasaran/Program Tahun 2019	Target Triwulan			
						TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	2		3	4	5	6	7	8	9
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi			Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50
		Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah bidang kesekretariatan	Nilai / Predikat AKIP	Nilai/Predikat	81,89 (A)	0	0	0	81,89 (A)
	1	Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen AKIP dan Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen Keuangan daerah	Dokumen	100%	65,22	78,26	86,96	100
	1.1	Penyusunan Dokumen AKIP	Dokumen AKIP yang memenuhi aspek kualitas	Dokumen	15	10	11	13	15
	1.2	Penyusunan Dokumen Keuangan	Dokumen Keuangan yang memenuhi aspek kualitas	Dokumen	12	8	10	11	12



Pada tabel 2.2, dapat dijelaskan bahwa sekretariat merupakan urusan layanan/urusan rutin. Dimana tujuan merupakan Misi 5 (lima) dari RPJMD 2018 – 2023. Yang dari Indeks Reformasi Birokrasi target sebesar 23,50 untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk mendukung hasil dari Indeks Reformasi Birokrasi, yaitu Nilai / Predikat AKIP sebesar 81,89. Dengan Perjanjian Kinerja dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdiri dari 1 program yaitu Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan 2 (dua) kegiatan yaitu : Penyusunan Dokumen AKIP sebanyak 15 (sebelas) dokumen dan Penyusunan Dokumen Keuangan sebanyak 12 (dua belas) dokumen.

Aspek pemenuhan dokumen-dokumen AKIP yaitu :

NAMA DOKUMEN		JUMLAH
1	Renstra	1 dokumen
2	Berita Acara Reviu Renstra	1 dokumen
3	Cascading Kinerja Tahun 2019	1 dokumen
4	Renja 2019 (Murni, Perubahan)	2 dokumen
5	IKU + SK 2019	1 dokumen
6	PK Murni 2019 S.D Ess Iv Dan Jabatan Fungsional (Staf)	1 dokumen
7	PK Perubahan 2019 S.D Ess Iv Dan Jabatan Fungsional (Staf)	1 dokumen
8	Rencana Aksi 2019	1 dokumen
9	Capaian Kinerja Triwulan Th. 2019	4 dokumen
10	Laporan Kinerja (Lkj) Tahun 2019	1 dokumen
11	Peta Strategi & Struktur Organisasi serta Template Format Keselarasan Kinerja	1 dokumen
JUMLAH		15 dokumen

Untuk Aspek pemenuhan dokumen-dokumen AKIP, pemasangan ditarget ditriwulan diambil berdasarkan dokumen berurutan. Dan pada triwulan 1 mempunyai target lebih besar dibandingkan dengan triwulan lain yaitu 10, dikarenakan penyusunan dokumen inti seperti Renstra, Renja, Dokumen Cascading, SK IKU, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi dan dokumen pendukung lainnya terlebih dahulu dibuat, karena sebagai dasar pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.



Aspek pemenuhan untuk Penyusunan Dokumen Keuangan yaitu :

Nama Dokumen		Jumlah
1	Renstra	1 dokumen
2	Renja	1 dokumen
3	RKBMD pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan	2 dokumen
4	PRA RKA Murni dan Perubahan	2 dokumen
5	RKA Murni	1 dokumen
6	RKA Perubahan	1 dokumen
7	DPA	1 dokumen
8	Laporan Triwulan	1 dokumen
9	Laporan Prognosis Semesteran 1	1 dokumen
10	Laporan Tahunan (CALAK)	1 dokumen
Jumlah		12 dokumen

Sedangkan untuk Aspek pemenuhan untuk Penyusunan Dokumen Keuangan, pemasangan ditarget ditriwulan diambil berdasarkan dokumen berurutan. Dan pada triwulan 1 mempunyai target lebih besar dibandingkan dengan triwulan lain yaitu 8, dikarenakan penyusunan dokumen inti seperti Renstra, Renja, RKBMD pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan, Dokumen PRA RKA Murni dan Perubahan, RKA Murni, DPA, Laporan Triwulan, Laporan Prognosis Semesteran 1 terlebih dahulu dibuat, karena sebagai dasar pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan dari segi keuangan dan pelaksanaan kegiatan.



2.2.2 URUSAN PENANAMAN MODAL

Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Tujuan/Sasaran /Program Tahun 2019	Target Triwulan			
						TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	2		3	4	5	6	7	8	9
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif		Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif	Persentase Peningkatan PMDN	Persen	4,50	0,3 %	1,5 %	3,4 %	4,5 %
	18	Program peningkatan Realisasi Investasi	Realisasi Investasi PMDN	Rupiah	580 M	58 M	203 M	464 M	580 M
	18.04	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal	Jumlah dokumen RUPM yang terbit	Buah	1	0	0	0	1
	19	Program Penguatan Iklim Investasi	Persentase kepatuhan investor terhadap perundang-undangan	Persen	35	8 %	16 %	25,5 %	35 %
	19.04	Penyusunan laporan pengawasan dan pengendalian penanaman modal	Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian penanaman modal	Jumlah	10	2	4	7	10



Pada tabel 2.2.2 Urusan Penanaman Modal, dijelaskan bahwa tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif. Sebagai alur pendukung dari tujuan Dinas maka disusun program dari penanaman modal yaitu : Program peningkatan Realisasi Investasi dengan 1 kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal. Dari mulai tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Program, sampai kegiatan mempunyai target masing-masing. Dimulai dari tujuan, sebesar 4,5 %, Program sebanyak 580 Milyar. Pada triwulan 1 target realisasi sudah berisi perkiraan yaitu untuk sasaran meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif di targetkan dapat terealisasi 0,3 %, kemudian pada program peningkatan realisasi investasi ditargetkan 58 Milyar, tetapi pada kegiatan penyusunan rencana umum penanaman modal targetnya 0 karena akan direalisasikan pada triwulan IV. Untuk program pengutan iklim investasi target di triwulan I sebesar 8% dilanjutkan triwulan II juga 8 %. Pada kegiatan penyusunan laporan pengawasan dan pengendalian penanaman modal juga telah mulai ditergetkan mulai dari triwulan I sampai dengan triwulan IV.

Pada triwulan IV nanti akan terlihat hasil target pencapaian akhir yang dilaksanakan oleh Bidang Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.



2.2.3 URUSAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Tujuan/Sasaran/Program Tahun 2019	Target Triwulan			
						TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	2		3	4	5	6	7	8	9
Meningkatkan Tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan public yang berbasis teknologi informasi		Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas pelayanan publik	Kategori Nilai Kinerja Unit Pelayanan Publik (UPP)	Nilai	4,51 (A)	0	0	0	4,51 (A)
	20	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	Persentase pemenuhan aspek penyelenggaraan pelayanan public kategori pelayanan prima	Persen	90,20	84	86	90	90,20
	20.05	Penyusunan kebijakan pelayanan publik	Terlaksananya aspek kebijakan pelayanan publik	Kegiatan	3	0	3	3	3
	20.05	Peningkatan profesionalisme SDM	Sumber Daya Manusia yang berkualitas	orang	30	0	0	30	30



Berdasarkan tabel 2.2.3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan, mempunyai urusan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan tujuan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berbasis teknologi informasi dengan sasaran Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas pelayanan publik dengan target di Tahun 2019, yaitu dengan nilai 4,51 (A). Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mendukung sasaran dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas pelayanan publik, maka disusunlah Program Pelayanan dengan didukung kegiatan-kegiatan. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dengan target Tahun 2019, dengan target 90,20 %. Untuk mendukung mencapai target Program yaitu Kegiatan Penyusunan kebijakan pelayanan publik dengan target 3 kegiatan, dimana kegiatan ini dilaksanakan di Triwulan II. Selain itu, Kegiatan Peningkatan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) dengan target 30 orang akan dilaksanakan pada triwulan III.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama satu triwulan yang memuat realisasi kinerja yang diperjanjikan pada target Triwulan 2. Dalam bab ini juga akan disajikan akuntabilitas keuangan yang memuat realisasi anggaran Triwulan 1 (satu) tahun 2019.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka tujuan sasaran pada Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pencapaian Indikator Kinerja Utama terdapat pada Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran seperti pada table berikut :



TABEL 3.1
PENCAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT TRIWULAN II

Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Tujuan/Sasaran/Program Tahun 2019	Target Triwulan				Realisasi Triwulan				Capaian (%)				
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	11	12	13	14	
	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	23,50	22,40	22,80	23,10	23,50	22,40	22,88	0	0	100%	0	0	0
	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah bidang urusan kepemudaan, olahraga dan kepariwisataan	Nilai / Predikat AKIP	Nilai/ Predikat	81,89 (A)				81,89 (A)								
1	Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen AKIP dan Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen Keuangan daerah	Persen	100%	65,22	78,26	86,96	100	65,22	78,26			100%	100%		
1.1	Penyusunan Dokumen AKIP	Dokumen AKIP yang memenuhi aspek kualitas	Dokumen	15	10	11	13	15	10	11			100%	100%		
1.2	Penyusunan Dokumen Keuangan	Dokumen Keuangan yang memenuhi aspek kualitas	Dokumen	12	8	10	11	12	8	10			100%	100%		



Berdasarkan Tabel 3.1 di atas, Pencapaian Kinerja Urusan Kesekretariatan, sebagai tujuan sasaran strategis yaitu Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan, triwulan 2 ini realisasi yang ada tidak bisa dilaporkan sebagai laporan Realisasi sasaran karena bentuknya kegiatan selama setahun, sehingga output/keluaran akan disampaikan pada triwulan 4 (empat). Pada tabel diatas mempunyai program utama sebanyak 1 program dengan kegiatan utama 2 buah. Untuk kegiatan rutin program pendukung terdapat 3 buah dan kegiatan pendukung sebanyak 11 buah yang dilaksanakan sesuai rutin pengelolaan di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan yang terkait dengan Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan Indikator Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen AKIP dan Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen Keuangan daerah dengan kegiatan Penyusunan Dokumen AKIP dan Penyusunan Dokumen Keuangan.

Pada indikator kinerja sasaran pertama Indeks Reformasi Birokrasi hasil capaian kami target Triwulan 4 namun masih belum bisa diukur karena masih tahap persiapan kegiatan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memang melakukan pelayanan publik langsung, namun Indeks Reformasi Birokrasi yang diukur adalah pelayanan rutin Sekretariat kepada bidang-bidang baik dalam hal urusan ketatausahaan maupun urusan kepegawaian. Sedangkan indikator kinerja sasaran yang kedua yaitu Nilai/Peringkat AKIP hasil capaian juga kami target pada triwulan 4 masih belum bisa diukur karena hasil penilaian evaluasi Laporan AKIP oleh Kemenpan RB dilakukan pada triwulan 4.

Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, memiliki target kegiatan 78,25% atau jumlah 21 dokumen dari total jumlah 27 dokumen, dimana 15 untuk Dokumen Penyusunan AKIP dan 12 Dokumen dari penyusunan Dokumen



Keuangan. Dari Kegiatan Penyusunan AKIP, telah dilaksanakan sebanyak 10 di Triwulan I dan 1 dokumen di Triwulan II, tabel sebagai berikut :

Nama Dokumen		Jumlah
1	Renstra	1 dokumen
2	Berita Acara Reviu Renstra	1 dokumen
3	Cascading Kinerja Tahun 2019	1 dokumen
4	Renja 2019 (Murni)	1 dokumen
5	IKU + SK 2019	1 dokumen
6	PK Murni 2019 S.D Ess Iv Dan Jabatan Fungsional (Staf)	1 dokumen
7	PK Perubahan 2019 S.D Ess Iv Dan Jabatan Fungsional (Staf)	1 dokumen
8	Rencana Aksi 2019	1 dokumen
9	Capaian Kinerja Triwulan Th. 2019	2 dokumen
11	Peta Strategi & Struktur Organisasi serta Template Format Keselarasan Kinerja	1 dokumen
Jumlah		11 dokumen

Sedangkan untuk Penyusunan Dokumen Keuangan, pada Triwulan 1 sebanyak 8 Dokumen, dan pada triwulan II sebanyak 2 dokumen.

Aspek pemenuhan untuk Penyusunan Dokumen Keuangan yaitu :

Nama Dokumen		Jumlah
1	Renstra	1 dokumen
2	Renja	1 dokumen
3	RKBMD pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan	2 dokumen
4	PRA RKA Murni	1 dokumen
5	RKA Murni	1 dokumen
6	DPA	1 dokumen
7	Laporan Triwulan	2 dokumen
8	Laporan Prognosis Semesteran 1	1 dokumen
Jumlah		10 dokumen

Pada indikator kinerja program kami target ditiap triwulan pada aspek pemenuhan dokumen untuk kegiatan pelaporan AKIP yang pelaksanaan kegiatannya dilakukan setiap Triwulan dan Akhir Tahun, serta aspek pemenuhan dokumen untuk pelaporan keuangan yang pelaksanaan kegiatannya dilakukan setiap Triwulan, Semester dan Akhir.



TABEL 3.2

PENCAPAIAN KINERJA TRIWULAN URUSAN PENANAMAN MODAL

Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Tujuan/Sasaran/Program Tahun 2019	Target Triwulan				Realisasi Triwulan				Capaian (%)			
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	11	12	13	14
	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif	Persen	4,50	0,3	1,5	3,4	4,50	0	0			0	100		
18	Program peningkatan realisasi investasi	Rupiah	580 M	58 M	203 M	464 M	580 M	15,7 M	480 M			0	100		
18.04	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)	buah	1	0	0	0	1	0	0			0	100		
19	Program Penguatan Iklim Investasi	Persen	35	8	16	25,5	35	0	0			0	100		
19.04	Penyusunan Laporan Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal	Jumlah	10	2	4	7	10	0	0			0	100		



Pada Tabel 3.2 diatas, Pencapaian Kinerja Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yaitu sebagai urusan wajib Non Dasar Bidang Penanaman Modal mempunyai sasaran strategis dan mempunyai target yang harus dicapai. Untuk realisasi Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada triwulan 1 ini belum bisa disampaikan sebagai capaian akhir. Karena masih ada proses dalam kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mencapai target yang diharapkan.

No	Nama Kegiatan	Hasil	Keterangan
1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal	0	Belum terealisasi di triwulan I
2	Penyusunan Laporan Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal	0	Belum terealisasi di triwulan I

Bidang Penanaman Modal berdasarkan table diatas mempunyai 2 (dua) program dengan 2 (dua) kegiatan, di triwulan 2 ini, realisasi dari 2 kegiatan ini masih cukup kecil dimana untuk kegiatan Penyusunan rencana umum penanaman modal masih kecil karena dari 1 dokumen RUPM yang di buat belum ke arah selesai karena masih berbentuk konsep-konsep dan tim penyusunan juga masih berada di luar daerah, 1 kegiatan lainnya yaitu Penyusunan laporan pengawasan dan pengendalian penanaman modal juga belum dilaksanakan karena rencananya akan dilaksanakan pada triwulan III.



**TABEL 3.3
PENCAPAIAN KINERJA TRIWULAN 2
URUSAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Tujuan/Sasaran/Program Tahun 2019	Target Triwulan				Realisasi Triwulan				Capaian (%)			
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	11	12	13	14
	Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas pelayanan publik	Nilai	4,51 (A)				4,51 (A)	0	0			0	0		
20	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	Persen	90,20	84	86	90	90,20	0	0			0	60,00		
20.05	Penyusunan kebijakan pelayanan publik	Kegiatan	3	0	3	3	3	0	2			0	66,67		
20.05	Peningkatan Profesionalisme SDM	Orang	30	0	0	30	30	0	0			0	0		



Sedangkan untuk Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tabel 3.3 terdiri dari 1 program dengan 2 kegiatan, yaitu Penyusunan kebijakan pelayanan publik dan Peningkatan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM). Pada kegiatan Penyusunan kebijakan pelayanan publik telah dilaksanakan di triwulan 2 yakni pada bulan April 2019, berdasarkan target yang ingin dicapai adalah 86 %, realisasi sebesar 66,67 %.

Untuk kegiatan Peningkatan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksanaannya belum bisa dilaporkan pada Triwulan II, karena kegiatan dilaksanakan di bulan Juli di Triwulan III.

Dari seluruh hasil capaian kinerja urusan/bidang terkait yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu rangkuman capaian dapat pada table 3.5 berikut :



Tabel 3.5
CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2019
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KAB. HSS

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Tujuan, /Sasaran Strategis, dan Sasaran Program	Satuan	Target Tujuan/Sasaran/Program Tahun 2019	Target Triwulan				Realisasi Triwulan		Status		Keterangan
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 1	TW 2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	23,50	22,40	22,80	23,10	23,50	22,40	22,88			
Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas pelayanan publik	Nilai / Predikat AKIP	Nilai/Predikat	81,89 (A)	0	0	0	81,89 (A)	0	0			Capaian target di akhir (Triwulan 4)
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif	Persentase peningkatan PMDN	Persen	4,50	0,3	1,5	3,4	4,50	0	0			
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif	Realisasi Investasi PMDN	Rupiah	580 M	58	203	464	580	15,7	480			
	Persentase kepatuhan investor terhadap perundang-undangan	Persen	35	8	16	25,5	47,06	0	18,75			
Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas pelayanan publik	Kategori Nilai Kinerja Unit Pelayanan Publik (UPP)	Nilai	4,51 (A)	0	0	0	4,51 (A)	0	0			
	Terlaksananya aspek kebijakan pelayanan publik	kagitan	3	0	3	3	3	0	2			
	Sumber daya manusia yang berkualitas	orang	30	0	0	30	30	0	0			

Keterangan :

- Capaian > 100%
- Capaian > 90% - 100%
- Capaian > 75% - 90%
- Capaian < 50%



Untuk point 1, Realisasi PMDN pada Triwulan 1 (satu) dan triwulan 2 (dua) ini belum dapat dilaporkan bahwa Program dan Kegiatan sudah dilaksanakan pada bulan April 2019 untuk menjadi pendukung sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pada Tahun 2019 ini realisasinya belum dapat ditentukan apakah memenuhi target atau tidak karena pelaksanaan kegiatan dilakukan pada triwulan berikutnya.

Untuk poin 2, Terlaksananya aspek kebijakan pelayanan publik dapat dilaporkan berdasarkan tabel diatas bahwa Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan sampai triwulan 2 telah dapat terealisasi sebanyak 2 kegiatan dari 3 kegiatan yang di targetkan.

B. Realisasi Anggaran

Untuk mencapai sasaran strategis tahun 2019 Triwulan 2 dari pagu anggaran sebesar Rp 1.711.807.150 telah direalisasi sebesar 619.144.889 atau 36,17%, dengan rincian per program dan sasaran strategis sebagai berikut sebagai berikut:



Tabel 3.6
CAPAIAN REALISASI KEUANGAN TRIWULAN II TAHUN 2019
BERDASARKAN URUSAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KAB. HSS

1. Kesekretariatan (layanan penunjang perangkat daerah)

Sasaran/Program/Kegiatan	Pagu 1 Tahun	Target Rencana Belanja				Realisasi Keuangan		Capaian Target Rencana Belanja (%)		Capaian Realisasi Keuangan (%)	
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 1	TW 2	TW 1	TW 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas pelayanan publik	1.433.564.150	719.673.750	484.276.900	120.605.500	109.008.000	138.433.084	406.109.005	50,20	0,00	9,66	0,00
1 Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	9.500.000	2.000.000	4.500.000	3.000.000	-	0	2.400.000	21,05	0,00	0	0,00
Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah (Sekretariat)											
2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	866.973.150	373.457.750	290.901.900	104.105.500	98.508.000	131.585.566	104.341.523	43,08	0,00	35,23	0,00
3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	557.091.000	344.216.000	188.875.000	13.500.000	10.500.000	6.847.818	299.367.482	86,68	0,00	1,99	0,00



Pada tabel 3.6, untuk kesekretariatan, Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas pelayanan publik dengan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah (Sekretariat). Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan pagu dana sebesar Rp. 9.500.000,- , dengan target triwulan I sebesar Rp. 2.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 0,- sehingga capaian target rencana belanja dan capaian realisasi keuangan sebesar 0 %.


Kemudian untuk Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan pagu Rp. 866.973.150,-. dengan target triwulan I sebesar Rp. 373.457.750,-. dan realisasi keuangan sebesar Rp. 131.585.566,-, sehingga capaian target rencana belanja sebesar 35,23 % dan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 43,08 %. Untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan pagu Rp.557.091.000,-. dengan target triwulan I sebesar Rp. 344.216.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.847.818,-, sehingga capaian target rencana belanja sebesar 1,99 % dan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 86,68% .



2. PENANAMAN MODAL

Sasaran/Program/Kegiatan	Pagu 1 Ranun	Target Rencana Belanja				Realisasi Keuangan		Capaian Target Rencana Belanja (%)		Capaian Realisasi Keuangan (%)	
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 1	TW 2	TW 1	TW 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Inklusif	126.168.000	30.927.500	94.060.500	875.000	305.000	30.490.000	1.312.500	98,58	1,39	24,17	1,04
4 Program peningkatan realisasi investasi	124.113.000	30.490.000	93.623.000	-	-	30.490.000	1.312.500	100	1,40	24,57	1,06
5 Program Penguatan Iklim Investasi	2.055.000	437.500	437.500	875.000	305.000	0	0	0	0	0	0



 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dengan sasaran meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif, dengan pagu ditahun 2019, yaitu Rp. 126.168.000,- dengan target di triwulan I yaitu sebesar Rp. 30.927.500,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 30.490.000,- sehingga capaian target rencana belanja sebesar 98,58 % dan capaian realisasi keuangan sebesar 24,17 %. Begitu juga dengan program Peningkatan Realisasi Investasi sebagai pendukung dari sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dengan pagu di tahun 2019 sebesar Rp. 124.113.000,- dengan target di triwulan I sebesar Rp. 90.490.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 30.490.000,- sehingga capaian target rencana belanja sebesar Rp. 100 % dan capaian realisasi keuangan sebesar 24,57 %.

Program Penguatan Iklim Investasi yang juga sebagai pendukung dari sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dengan pagu di tahun 2019 sebesar Rp. 2.055.000,- dengan target di triwulan I sebesar Rp. 437.500,- dengan realisasi keuangan masih Rp.0,- sehingga capaian target rencana belanja dan capaian realisasi keuangan juga masih 0 % (belum terealisasi).



3. URUSAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Sasaran/Program/Kegiatan		Pagu 1 Tahun	Target Rencana Belanja				Realisasi Keuangan		Capaian Target Rencana Belanja (%)		Capaian Realisasi Keuangan (%)	
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 1	TW 2	TW 1	TW 2
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik		152.075.000	90.050.000	112.950.000	0	0	0	73.290.000	0	64,89	0	48,19
6	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	152.075.000	90.050.000	112.950.000	0	0	0	73.290.000	0	64,89	0	48,19



Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dengan sasaran meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas pelayanan publik, dengan pagu ditahun 2019, yaitu Rp. 152.075.000,- dari 2 kegiatan yaitu Penyusunan kebijakan pelayanan publik dan Peningkatan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM). Untuk Penyusunan kebijakan pelayanan publik dengan target di triwulan I yaitu sebesar Rp. 90.050.000,- dan target di triwulan II yaitu Rp. 11.100.000,- dengan realisasi keuangan untuk triwulan I masih 0 sehingga capaian target rencana belanja dan capaian realisasi keuangan juga masih 0, hal ini dikarenakan kegiatan ini pelaksanaannya berada di bulan juli atau triwulan III.

Untuk kegiatan Peningkatan profesionalisme SDM, dengan pagu untuk 1 (satu) tahun sebesar Rp. 50.925.000, realisasi target rencana dan realisasi keuangan masih 0, karena kegiatan ini dilaksanakan di bulan juli/ triwulan III.

Untuk perbandingan antara capaian realisasi anggaran dengan capaian realisasi kinerja berdasarkan urusan dapat dilihat pada tabel 3.6 di bawah ini :



Tabel 3.6
REALISASI ANGGARAN DIBANDINGKAN DENGAN REALISASI KINERJA
BERDASARKAN URUSAN DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA KAB. HSS

Sasaran/Program/Kegiatan		Realisasi Anggaran (%)				Realisasi Kinerja (%)				%			
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Kesekretariatan													
Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas pelayanan publik		9,66	28,33	0	0	0	0			0	0		
1	Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	21,05	31,58	0	0	65,22	78,26			0	0		
Penanaman Modal													
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif		24,57	1,06	0,00	0,00	0	100			98,58	1,39		
4	Program peningkatan realisasi investasi	24,57	1,06	0,00	0,00	0	100			98,58	1,39		
5	Program penguatan iklim investasi	0	0	0,00	0,00	0	100			0	0		
Pelayanan Terpadu Satu Pintu													
Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas pelayanan publik		0,00	48,19	0,00	0,00	0	0			0	64,89		
6	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	0,00	48,19	0,00	0,00	0	100			0	64,89		



BAB IV PENUTUP

Laporan Capaian Kinerja IKU Triwulan 1 (satu) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Pada perbandingan antara capaian kinerja dengan realisasi keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Triwulan 2 dapat digambarkan pada sasaran dan program sebagai berikut :

1. Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan pelayanan publik bidang urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dengan Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja realisasi kinerja 65,22 %, perbandingan terhadap realisasi keuangan yang sebesar 21,05 %.
2. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif dengan Program peningkatan realisasi masih 0 % dibandingkan dengan realisasi keuangan sebesar 0 % hal ini di karenakan realisasi keuangan akan direalisasikan pada triwulan IV. Demikian juga program penguatan iklim investasi pada triwulan I ini realisasi masih 0 % di karenakan program tersebut baru akan direalisasikan pada triwulan IV.
3. Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan pelayanan publik dengan Program Peningkatan Pelayanan Perizinan perbandingan hasil capaian 0% karena kegiatan ini pelaksanaannya pada triwulan II dan III.



Dari presentase hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Hulu Sungai Selatan di tahun pertama Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dengan Laporan Capaian Kinerja Triwulan 2 (dua) ini diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Kandangan, 30 Juni 2019

Kepala Dinas
Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Hulu Sungai Selatan,

Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA
Pembina Tk. I
NIP. 19660722 199303 2 006